

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL PADA ANAK DAN PENERAPAN HUKUMAN  
KASTRASI DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang  
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)**

**Syaiful Adam**

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku penyimpangan psikologi tersebut melakukannya bukan hanya pada satu anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dan Penerapan Hukuman *Kastrasi* di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai peranan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data – data dan bahan – bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan tesis. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hukuman *Kastrasi* tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan Hukuman *Kastrasi* tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman *Kastrasi* juga melanggar hak asasi manusia baik dilihat dari sisi pelaku ataupun jika dilihat dari sisi korban kejahatan kekerasan seksual, salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang tajam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai pasal 33 ayat (1) Undang – undang No.39 Tahun 1999. Selain Pengebirian itu sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Hukuman *Kastrasi*, Anak.

**LEGAL ENFORCEMENT TO MY ACTOR SEXUAL VIOLENCE ON  
CHILDREN AND IMPLEMENTATION CASH LAW IN INDONESIA  
(ANALYSIS LAW NUMBER 35 YEAR 2014 ABOUT CHILD PROTECTION  
AND LAW NO. 39 YEAR 1999 ABOUT HUMAN RIGHTS)**

**Syaiful Adam**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state, every act of society and state apparatus must be in accordance with the provisions in force with the Act. For those who commit unlawful acts must be processed by lawful procedure or procedure of settlement. Sexual harassment and sexual violence are psychological irregularities in which this leads to an unbalanced sex activity that poses a threat to a particular individual. Various penalties are being discussed in cases of sexual harassment, especially against children. Creating a deterrent effect is less able to have such a significant impact because the perpetrators of psychological irregularities do so not only in one child. The purpose of this study is to provide an overview of law enforcement in Indonesia against perpetrators of sexual violence in children, and the Application of Castration Punishment in Indonesia and provides an overview of the role of law enforcement officers in taking action against child sex offenders. Research methods used in this paper consists of various ways and activities undertaken in order to collect data and materials - materials required to complete the preparation of the thesis. The author uses literature research methods (Library Research). The castration punishment is not in accordance with the Indonesian punishment system and the Castration Punishment is not listed in Article 10 of the Criminal Code. Castrasi punishment also violates human rights either from the side of the perpetrator or if viewed from the side of the victims of sexual violence crimes, one of which is the right to be free from torture, punishment, sharp, inhuman and degrading treatment and human dignity in accordance with article 33 paragraph 1) of Law No.39 of 1999. In addition to castration itself is very contrary to the code of medical ethics.*

*Keywords : Law Enforcement, Sexual Violence, Castration Punishment, Child.*